



Pelaksanaan UMDS sebagai Pendukung Pengelolaan Dana Pengadaan pada Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya

Aditya Rizki Tamami*, Acep Samsudin

Administrasi Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Email: 23042010128@student.upnjatim.ac.id*, Acep.samsudin.adbis@upnjatim.c.id

Abstract. *Effective and accountable procurement fund management is a key factor in supporting the smooth operation of a company, particularly in the railway transportation sector, which requires a rapid response to operational needs. PT Kereta Api Indonesia (Persero) has implemented the Temporary Advance Payment System (UMDS) as a funding mechanism to meet urgent operational needs. This study aims to analyze the implementation of UMDS in supporting procurement fund management at the Signaling, Telecommunications, and Electrical Unit (Sintelis) of PT KAI Daop 8 Surabaya. The study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, documentation, and literature review. Data were analyzed descriptively through the processes of data collection, grouping, and interpretation. The results indicate that the implementation of UMDS has proceeded in accordance with procedures through the stages of preparing the Cost Estimate (RAB), verification, approval, fund disbursement, and the preparation of the Accountability Report (LPJ). The UMDS contributes to accelerating the fulfillment of operational needs, improving procurement efficiency, and supporting transparency and accountability in fund management. Challenges identified include budget constraints, administrative delays in the LPJ, and technical system obstacles, which were addressed through inter-unit coordination, administrative oversight, and regular system maintenance.*

Keywords: *Temporary Departmental Advance Payment System (UMDS), Fund Management, Procurement of Goods and Services, Accountability, Sintelis Unit.*

Abstrak. Pengelolaan dana pengadaan yang efektif dan akuntabel merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan, khususnya pada sektor transportasi perkeretaapian yang memerlukan respons cepat terhadap kebutuhan operasional. PT Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) sebagai mekanisme pendanaan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan UMDS dalam mendukung pengelolaan dana pengadaan pada Unit Persinyalan, Telekomunikasi, dan Kelistrikan (Sintelis) PT KAI Daop 8 Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UMDS telah berjalan sesuai prosedur melalui tahapan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), verifikasi, persetujuan, pencairan dana, dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). UMDS berkontribusi dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional, meningkatkan efisiensi pengadaan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, keterlambatan administrasi LPJ, dan hambatan teknis sistem yang diatasi melalui koordinasi antarunit, pengawasan administratif, dan pemeliharaan sistem secara berkala.

Kata kunci: Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS), Pengelolaan Dana, Pengadaan Barang dan Jasa, Akuntabilitas, Unit Sintelis.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan dana untuk pengadaan ialah suatu hal yang krusial dalam meningkatkan efektivitas operasi sebuah organisasi. Ketersediaan dana yang cukup dan

Received: June 02, 2026; Revised: June 09, 2026; Accepted: June 16, 2026; Published: August 31, 2026

**Corresponding author, e-mail address*

dapat diperoleh tepat waktu menjadi elemen kunci untuk memastikan kegiatan operasional berjalan lancar, terutama bagi organisasi dengan mobilitas dan kerumitan kerja yang cukup tinggi. Manajemen dana yang efektif tidak hanya fokus pada memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sehingga pemanfaatan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana yang efisien memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan operasional dengan cepat tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan tata kelola finansial.

Di sektor transportasi kereta api, kelangsungan operasional sangat bergantung pada ketahanan sarana dan prasarana yang ada. Gangguan dalam sistem operasional bisa berdampak langsung pada keselamatan perjalanan kereta serta kualitas layanan bagi penumpang. Untuk itu, kebutuhan akan barang dan jasa pendukung operasional sering kali mendesak dan memerlukan mekanisme pendanaan yang cepat agar pemeliharaan dan perbaikan dapat dilaksanakan tanpa penundaan. Situasi ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki sistem pengelolaan dana yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan operasional dalam proses pengadaan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyedia layanan transportasi kereta api di tanah air memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan, keamanan dan kelancaran perjalanan kereta. Salah satu unit yang memiliki peran strategis dalam mendukung operasional tersebut adalah Unit Persinyalan, Telekomunikasi, dan Kelistrikan (Sintelis). Unit Sintelis di PT KAI Daop 8 Surabaya mengatur 12 stasiun yang bertugas untuk merawat dan memperbaiki sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan yang berhubung langsung dengan keselamatan perjalanan kereta. Untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak, PT KAI telah menerapkan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) sebagai metode pendanaan yang memungkinkan setiap unit kerja untuk mendapatkan dana dengan lebih cepat dibandingkan cara pengadaan yang biasa. Dengan sistem ini, kebutuhan operasional dapat segera dipenuhi sambil tetap mengikuti prosedur administrasi dan akuntabilitas keuangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa yang didukung dengan tata kelola administrasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional suatu organisasi. Siregar dan Aslami (2022) menemukan bahwa sistem

pengadaan yang terencana dapat membantu kelancaran operasional PT KAI. Penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang baik sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan serta kualitas dari proses pengadaan barang dan jasa. Meski begitu, penelitian yang secara spesifik membahas implementasi Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) sebagai metode pendanaan operasional untuk mendukung pemeliharaan dana pengadaan di PT KAI masih tergolong sedikit. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada sistem pengadaan dan pengelolaan keuangan secara umum, sehingga peran UMDS dalam mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan operasional belum banyak dikaji.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kurangnya penelitian yang membahas tentang penerapan UMDS untuk membantu pengelolaan dana pengadaan di unit operasional yang berkaitan langsung dengan keselamatan perjalanan kereta api. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) dalam mendukung pengelolaan dana pengadaan di Unit Sintelis PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya, mencakup keuntungan, tantangan, serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Pelaksanaan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS)

Penerapan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) adalah suatu cara pengelolaan anggaran yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak melalui penyediaan dana sementara yang harus dipertanggungjawabkan setelah pelaksanaan kegiatan selesai. Proses UMDS secara umum melibatkan langkah-langkah seperti pengajuan dana yang dibutuhkan, pemeriksaan dokumen, persetujuan dari pejabat yang berwenang, pencairan dana, penggunaan dana, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan dana (Nabila & Munari, 2025). Keefektifan pelaksanaan UMDS dipengaruhi oleh adanya prosedur yang jelas, dokumentasi yang menyeluruh, dan pengawasan yang cukup. Penerapan prosedur yang teratur dapat memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (Ajis et al., 2024). Di samping itu, pengawasan dan pemantauan yang berlangsung terus-menerus berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana dan

pengadaan barang atau jasa melalui kesesuaian antara penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, dan tanggung jawab administratif (Pakasi & Waani, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan UMDS dapat dipahami sebagai serangkaian proses pendanaan operasional yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan organisasi dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana adalah proses yang melibatkan perencanaan, penggunaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumber daya finansial guna mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana yang efektif memerlukan adanya sistem pengendalian internal yang baik, sehingga penggunaan anggaran dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan (Yuanita & Suropto, 2022). Dalam proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dana memainkan peran krusial dalam menjamin tersedianya anggaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi. Keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana terbukti berdampak pada keefektifan penggunaan anggaran serta meningkatkan kualitas manajemen organisasi (Ra'is & Rini, 2024). Maka dari itu, pengelolaan dana lebih sekedar aktivitas administratif keuangan, melainkan ini juga merupakan alat yang esensial untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi.

Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa adalah rangkaian aktivitas untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu organisasi, dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian keseluruhan proses pengadaan. (Mantika & Wardani, 2024). Pengadaan yang efisien hendaknya dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi. Menurut Rakhman (2023) menyatakan bahwa keberhasilan dalam proses pengadaan tidak hanya bergantung pada anggaran yang tersedia, tetapi juga dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, prosedur yang terstruktur, dan pengawasan yang tepat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta kontrol yang baik dapat meningkatkan mutu proses pengadaan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam lingkungan organisasi, pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi. Oleh karenanya, pengelolaan pengadaan yang baik menjadi salah satu komponen krusial dalam membantu pencapaian tujuan organisasi dan kelangsungan kegiatan operasional.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi implementasi Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) dalam mendukung pengelolaan dana untuk pengadaan di Unit Persinyalan, Telekomunikasi dan Kelistrikan (Sintelis) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya. Penelitian ini menitikberatkan pada proses pelaksanaan UMDS, manfaat yang muncul serta tantangan yang dialami saat pelaksanaan. Penelitian dilakukan di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya. Data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan pengkajian literatur. Sumber data terdiri dari penulis yang terlibat dalam pelaksanaan UMDS serta dokumen pendukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), dokumen UMDS dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, reduksi dan interpretasi untuk mendapatkan pemahaman mengenai pelaksanaan UMDS dalam mendukung pengelolaan dana pengadaan di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengelolaan Dana Pengadaan Barang dan Jasa dalam UMDS

Pelaksanaan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak, terutama untuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sistem sinyal, telekomunikasi, serta kelistrikan di 12 stasiun kerja. Pengelolaan dana pengadaan melalui UMDS dimulai dengan identifikasi kebutuhan operasional oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar untuk pengajuan dana. Setelah RAB disusun, dokumen tersebut diverifikasi oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa kebutuhan yang diajukan, kelengkapan

dokumen, serta biaya yang diminta adalah wajar. Setelah verifikasi selesai, pengajuan dana dievaluasi dan mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang sebelum diserahkan ke bagian keuangan untuk ditelaah lebih lanjut dan dicatat dalam sistem administrasi perusahaan.

Setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, dana UMDS dicairkan dan digunakan sesuai kebutuhan operasional yang telah ditentukan. Penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan RAB yang telah disetujui dan dilengkapi dengan bukti transaksi yang valid. Begitu kegiatan selesai, unit pelaksana diwajibkan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang mencakup rincian penggunaan dana serta dokumen pendukung sebagai bentuk akuntabilitas. Selanjutnya, LPJ akan diperiksa dan diverifikasi oleh pihak terkait untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Proses ini menegaskan bahwa pelaksanaan UMDS tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyediakan dana operasional dengan cepat, tetapi juga menerapkan prinsip pengendalian internal melalui tahap verifikasi, persetujuan bertingkat, pencatatan sistem, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana pengadaan dengan menggunakan UMDS telah dilakukan secara sistematis dan mematuhi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan finansial. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nabila dan Munari (2025) yang menyebutkan bahwa seberapa efektif sistem uang muka operasional dipengaruhi oleh kelengkapan prosedur, verifikasi administratif, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tepat. Oleh karena itu, UMDS tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendanaan operasional tetapi juga sebagai alat yang mendukung efektivitas dalam pengelolaan dana pengadaan di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya.

Manfaat Pelaksanaan UMDS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pengelolaan dana pengadaan di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya. Adanya UMDS memfasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional yang mendesak dengan lebih cepat tanpa harus menunggu proses pengadaan yang biasanya memakan waktu lebih lama. Hal ini sangat vital mengingat Unit Sintelis bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan sistem persinyalan, komunikasi, serta kelistrikan di 12 stasiun yang berhubungan langsung

dengan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Dengan menggunakan UMDS, kebutuhan material dan layanan yang diperlukan untuk menangani gangguan dan pemeliharaan dapat segera dipenuhi, sehingga meminimalkan potensi gangguan operasi. Selain mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional, UMDS juga turut meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pengadaan. Proses pengajuan yang dimulai dengan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), verifikasi dokumen, dan mekanisme pertanggungjawaban melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berfungsi untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai rencana dan kebutuhan. Dengan adanya prosedur ini, pengeluaran dana menjadi lebih terkendali, sehingga dapat mengurangi risiko pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Keuntungan lainnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pengadaan. Setiap penggunaan dana UMDS harus didukung dengan dokumen administrasi dan bukti transaksi yang kemudian diperiksa melalui proses LPJ. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk mengawasi penggunaan dana sekaligus memastikan kesesuaian antara dana yang dicairkan dan kegiatan yang dilaksanakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siregar dan Aslami (2022) yang menunjukkan bahwa sistem pengadaan yang didukung oleh administrasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas operasional organisasi. Dengan demikian, UMDS berperan tidak hanya sebagai alat pendanaan operasional, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pengadaan di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya.

Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan UMDS

Meskipun penerapan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) menawarkan banyak manfaat untuk pengelolaan dana pengadaan, ada beberapa hambatan dalam praktik yang memengaruhi keberhasilannya. Salah satu hambatan yang signifikan adalah keterbatasan Anggaran yang disebabkan kebijakan efisiensi di perusahaan. Situasi ini mengakibatkan tidak semua kebutuhan operasional bisa dipenuhi lewat UMDS, sehingga diperlukan penyesuaian prioritas dalam penggunaan dana. Selain itu, UMDS hanya dapat diterapkan untuk keperluan dengan jumlah tertentu, yakni di bawah Rp50.000.000, sehingga kebutuhan pengadaan yang nilainya lebih tinggi harus menggunakan metode pengadaan lain yang memerlukan proses dan waktu lebih lama. Hambatan lainnya

berkaitan dengan aspek administratif, terutama keterlambatan dalam pengiriman Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Keterlambatan ini dapat menghambat pengajuan dana selanjutnya karena pencairan UMDS hanya bisa dilakukan setelah semua kewajiban administratif sebelumnya diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam menyiapkan dan mengirimkan LPJ adalah faktor krusial untuk menjaga kelancaran pengelolaan dana pengadaan. Selain itu, pelaksanaan UMDS juga menghadapi masalah teknis berupa gangguan sistem dan keterbatasan internet yang bisa memperlambat proses penginputan data, verifikasi dokumen, dan pelaporan administrasi keuangan.

Untuk menangani berbagai masalah tersebut, Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya melaksanakan beberapa upaya perbaikan. Dari sisi administratif, dilakukan pengawasan rutin dengan menetapkan tenggat waktu untuk pengiriman dokumen, memantau status laporan pertanggungjawaban dana, serta menindaklanjuti kepada unit yang belum menyelesaikan kewajiban administrasi mereka. Sementara itu, untuk mengatasi kendala teknis, koordinasi dilakukan dengan bagian teknologi informasi (TI) untuk menangani gangguan sistem, serta pemeliharaan sistem secara periodik untuk menjaga stabilitas operasional aplikasi yang digunakan. Upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMDS tidak hanya bergantung pada kepatuhan prosedur keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarunit dan dukungan sistem informasi yang memadai. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakasi dan Waani (2023) yang menyebutkan bahwa pengawasan dan pemantauan terus menerus merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan peningkatan kepatuhan administratif, optimalisasi sistem informasi, serta penguatan koordinasi antarunit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan UMDS dan memastikan kelancaran pengelolaan dana pengadaan di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dari studi ini, penerapan Sistem Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) di Unit Sintelis PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya telah memberikan kontribusi dalam pengelolaan dana pengadaan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang mendesak. Proses pelaksanaan UMDS mencakup langkah-langkah seperti pengajuan, verifikasi, pencairan, penggunaan dana, serta

pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Adanya UMDS memberikan keuntungan berupa percepatan dalam memenuhi kebutuhan operasional serta mendukung kelancaran proses pemeliharaan dan perbaikan sarana operasional. Namun, pada praktiknya, beberapa masalah masih muncul, seperti keterlambatan dalam pengiriman LPJ, keterbatasan jumlah dana, dan gangguan sistem yang dapat mempengaruhi kelangsungan proses administrasi.

Secara keseluruhan, UMDS telah berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pengadaan di Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya dengan tetap mengedepankan aspek akuntabilitas dan pengendalian keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan UMDS, diperlukan disiplin yang lebih baik dalam pengiriman dokumen pertanggungjawaban, peningkatan koordinasi antar unit, serta optimalisasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pengajuan dan pelaporan dana. Studi ini mempunyai batasan karena hanya difokuskan pada Unit Sintelis PT KAI Daop 8 Surabaya sehingga hasilnya belum dapat diterapkan secara umum pada semua unit kerja PT KAI. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat mengevaluasi pelaksanaan UMDS di unit atau daerah operasi lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas sistem ini dalam mendukung pengelolaan dana pengadaan.

DAFTAR REFERENSI

- Ajis, H. A., Nugroho, G. W., Eriswanto, E., Akuntansi, P. S., Sukabumi, U. M., Sukaraja, K., & Sukabumi, K. (2024). ANALISIS AKUNTANSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN. 5, 1065–1074.
- Akuntansi, D. A. N. (2025). Jurnal ilmiah manajemen dan akuntansi. 2(5), 1–5.
- Bos, D., Partisipasi, D., Variabel, S., Kadir, M. A., & Fajriah, Y. (2024). Management With Participation As A Moderating Variable Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan. 5(2), 4745–4756.
- Carolina, M. T., Pramiudi, U., & Wahyuni, I. (2021). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Terhadap Pengendalian Internal Kas*. 1(2).
- Dan, T., Pengelolaan, A., Desa, D., & Umamur, D. (2024). ANALISA TREN PENGELOLAAN DANA DESA 2016-2024 Transparency and Accountability in Village Fund Management : An Analysis of Trends in Village Fund Management 2016-2024. 1(2), 89–102.
- Hardjomuljadi, S. (2025). *Asas Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan Barang / Jasa*. 6(12), 5754–5761.
- Keuangan, P., Aset, D. A. N., & Bpkad, D. (2019). *ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN*. 2(April),

72–82.

- Kuntadi, C., & Yuslina, R. (2023). *Literature Review : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Anggaran Pengadaan Barang / Jasa : Perencanaan Anggaran , Komitmen Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. 4(4), 469–478.
- Mukhlis, M., & Pranoto, R. (2020). *The Implication of Electronics Procurement for Financial Efficiency and Optimization of Government Functions Implikasi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik bagi Efisiensi Keuangan dan Optimalisasi Fungsi Pemerintahan*. 08(1), 38–56.
- Pakasi, N. C., & Waani, Z. R. (2023). Kajian Pelaksanaan Continous Monitoring dan Continous Audit Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pendahuluan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan suatu lembaga yang. 6(1), 69–80. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i1.2642>
- Peraturan, B., & Nomor, P. (2024). *Jurnal Commerce Law*. 4(1).
- Rakhman, A. A. (2023). *Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa*. 2(1), 47–63.
- Sistem, A., Barang, P., Jasa, D. A. N., Upt, D. I., Yasa, B., Pt, P., & Persero, K. A. I. (2022). Analisis sistem pengadaan barang dan jasa di upt. balai yasa pulubrayan pt. kai (persero). 6(1).
- Sugiri, D. L., Rosadi, B., & Susanty, A. (2023). Peran Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Kedisiplinan dalam Kualitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Jabar. 6, 5827–5832.
- Sumbawati, N., & Sutrisno, E. (2025). *Analisis Pengaruh Manajemen Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Era Digital*.